

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai tujuan nasional dan juga kebijakan luar negeri dalam melakukan kerja sama dengan negara lain. Untuk itu setiap negara perlu merumuskan sebuah kebijakan agar dapat hidup bekerja sama dengan negara lain dalam mencapai sebuah tujuan bersama melalui sebuah kerja sama internasional.

Didalam kebijakan luar negeri ada dua konsep yang paling sering muncul, yang pertama adalah kepentingan nasional atau *National Interest*. Kepentingan nasional bukanlah sebuah istilah yang mudah didefinisikan, banyak perdebatan diantara para ahli. Namun karena sebuah negara dianggap sebagai aktor internasional yang rasional, maka setiap kebijakan yang dilakukan sebuah negara seringkali mencerminkan kepentingan nasional negara itu sendiri. Hal ini didukung dengan pernyataan Joseph Frankel yang mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan deskripsi yang paling komprehensif dan kompleks dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Yang kedua adalah konsep *power* atau kekuatan yang biasanya identik dengan penggunaan pengaruh yang sifatnya memaksa secara halus baik kepada kelompok atau negara lain untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dikehendaki anggota negara lain ([http:// www.da.mod.uk/college/rcd/seaford-house-paper/2012](http://www.da.mod.uk/college/rcd/seaford-house-paper/2012) (Di akses 11 September 2017)).

Kondisi saat ini, politik internasional tidak bisa dipahami lagi hanya sebatas melalui satu perspektif saja, studi hubungan internasional tidak cukup bila hanya

membahas soal politik tanpa mempelajari ekonomi. Maka dari itu, dikarenakan keterkaitan antara ekonomi (kesejahteraan) dan politik (kekuasaan) inilah sehingga dikenal dalam hubungan internasional sebagai ekonomi politik Internasional.

Dalam ekonomi politik internasional, Bantuan luar negeri menjadi instrumen dalam pencapaian suatu pembangunan atau pertumbuhan dengan dibantu oleh pihak lain seperti negara ataupun organisasi. Bervariasi jenis bantuan yang ada dan diberikan termasuk bantuan kepada Indonesia. Indonesia pada sejarahnya menerima bantuan pertama dalam mencegah kelaparan 1948 oleh Unicef ini telah menerima banyak banyak jenis bantuan salah satunya oleh Amerika Serikat USAID (*United State Agency For International Development*) (<http://www.secribd.com/doc/37849028/kronologi-sejarah-Unicef-Di-Indonesia> (Diakses pada 15 Oktober 2017)).

Amerika Serikat (AS) adalah negara *super power* yang mempunyai banyak pengaruh di dunia internasional, politik luar negeri AS mampu memimpin percaturan internasional baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi dan militer. Power negara merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam studi politik internasional. Power dalam perspektif realis merupakan konsep sentral. Hal ini berkaitan dengan aksi negara dalam politik internasional. Negara mengejar kepentingan nasionalnya sebagai alasan dibalik setiap tindakan negara, maksimalisasi power adalah kepentingan suatu negara.

Kawasan Asia merupakan kepentingan lama dalam politik luar negerinya Amerika, terutama setelah perang dunia II, AS mempunyai kekuatan dominan di Asia Pasifik hal ini dikarenakan kepentingan AS dikawasan ini sangatlah penting.

Hadirnya AS dikawasan ini menjadi dasar bagi terciptanya perdamaian dan kestabilan keamanan selama perang dingin berlangsung saat itu.

Dalam menjaga kestabilan keamanan dan demokrasi dikawasan Asia Tenggara terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Amerika memiliki kebijakan luar negeri yang mencakup isu-isu sumber energi global. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang utama adalah minyak dan gas bumi. Oleh karena itu Amerika Serikat secara tidak langsung harus menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

Amerika Serikat mengimplementasikan kebijakan luar negeri melalui bantuan luar negeri (*Foreign Aid*). Bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan, merupakan salah satu instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama sejak akhir Perang Dunia II. Bantuan sebagian besar terdiri dari transfer uang, barang atau jasa dari suatu negara lain. Bantuan militer dan bantuan pangan adalah satu bentuk awal dari bantuan luar negeri. Di dekade terakhir proyek bantuan dengan tujuan meningkatkan pembangunan di negara penerima bantuan sudah umum.

Konsep modern bantuan pembangunan internasional mulai terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1945. George C. Marshall, sekretaris negara dari tahun 1947 hingga 1949 memberikan bantuan keuangan dan teknis yang signifikan ke Eropa setelah perang. Dikenal sebagai Marshall Plan, usaha ini berhasil dan memungkinkan Eropa membangun kembali infrastrukturnya, memperkuat ekonominya dan menstabilkan kawasan ini.

Pada tahun 1990an, prioritas utama yaitu pembangunan berkelanjutan, atau membantu negara-negara memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri. Selama dekade ini, USAID (*United State Agency For International Development*) merancang program bantuan pembangunan untuk kondisi ekonomi suatu negara, USAID bekerja di lebih dari 100 negara di seluruh dunia dengan tujuan menyeluruh yang sama seperti yang dipegang Presiden John F Kennedy 50 tahun yang lalu, memajukan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika dalam memperluas demokrasi dan pasar bebas sambil memberikan bantuan kepada orang-orang yang berjuang untuk membuat kehidupan yang lebih baik, pulih dari bencana atau berjuang untuk hidup di negara yang bebas dan demokratis. Perhatian inilah yang menjadi ciri khas Amerika Serikat di seluruh dunia termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia (<https://www.usaid.gov/what-we-do> (Diakses tanggal 25 Oktober 2017)).

Dalam menyalurkan bantuan luar negeri Amerika Serikat, USAID bekerjasama dengan organisasi-organisasi sukarela swasta, organisasi adat, universitas, lembaga internasional, perusahaan swasta dan badan pemerintah Amerika Serikat lainnya. USAID membagi bantuannya menjadi beberapa bidang diantaranya :

1. Pertanian dan Ketahanan pangan
2. Demokrasi Pemerintahan dan Hak Asasi Kemanusiaan
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan
4. Pendidikan
5. Mengentaskan Kemiskinan

6. Lingkungan dan Perubahan Iklim Global
7. Air dan Sanitasi
8. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
9. Kesehatan Global
10. Bekerja dalam krisis dan konflik (www.usaid.gov/our-mission (25 Oktober 2018)).

Dari kesepuluh bidang kerjasama yang dilakukan USAID diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada point ke-1 yaitu mengenai Pertanian. Pada tahun 2016, Amerika Serikat mengesahkan Undang-undang ketahanan pangan global untuk memperkuat komitmen pemerintahan AS yang terus berlanjut, berperan dalam mengurangi kelaparan, kurang gizi dan kemiskinan di seluruh dunia.

Pertanian di Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dan penting. Selain sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena sebagai kontributor kedua terbesar setelah industri manufaktur terhadap PDB, juga penyedia bahan-bahan pokok agar inflasi tetap terkendali dan penghasil devisa negara. Sebagai penggerak ekonomi rakyat, peran nyata pertanian dalam konteks ini adalah sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat dan sumber pendapatan utama petani (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional> (Diakses tanggal 29 Oktober 2017)).

Meski memiliki peran yang sangat penting, namun sektor pertanian terhadap perekonomian nasional terus mengalami penurunan. Selain itu, serapan tenaga kerja sektor tersebut juga terus merosot. Data bank sentral menunjukkan,

dalam kurun waktu 1990 hingga 2016, sektor pertanian menurun drastis dari 22,09 terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 13,45 %. Sementara itu, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga menurun dari 55,3 % menjadi 31,9 % (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/30204932226/tiga.masalah.utama.sektor.pertanian.nasional.apa.saja> (Diakses tanggal 30 Oktober 2017)).

Produktivitas pangan di Indonesia dalam 10 Tahun terakhir masih tetap tidak meningkat secara signifikan. Salah satunya disebabkan kondisi infrastruktur irigasi yang sudah rusak parah, penyerapan tenaga kerja yang menurun drastis, salah satunya adalah faktornya kepemilikan lahan dan teknologi pasca panen (<http://bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/> (Diakses 19 Oktober 2017)).

Pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Namun, mereka selalu dalam posisi yang sulit, terutama jika terkait dengan harga pangan. Petani sering tidak menerima keuntungan besar meskipun harga pangan dalam negeri naik tinggi. Di sisi lain, apabila harga pangan terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, kebijakan yang di ambil pemerintah seringkali tidak berpihak pada petani. Contohnya kebijakan impor yang justru membuat produksi petani kurang laku di pasaran karena harga dan kualitas yang bersaing.

Tidak hanya itu, permasalahan pertanian di Indonesia saat ini masih terkait dengan kesenjangan ekonomi, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan, minimnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, lemahnya sistem alih teknologi, keterbatasan akses layanan usaha, panjangnya mata rantai tata niaga pertanian dan lain sebagainya.

Khususnya sektor pertanian di provinsi Jawa Barat, sektor ini sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat. Didalam sektor pertanian Jawa Barat ada beberapa jenis tanaman yang menjadi fokus utama yaitu Hortikultura.

Kata Hortikultura sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Hortus* berarti (tanaman kebun) dan *cultura/colore* (budidaya), bila di gabungkan menjadi Budidaya tanaman kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan, bidang kerjanya mencakup pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama, penyakit panen, pengemasan dan distribusi.

Dalam skala usaha kecil, pengembangan hortikultura dengan teknologi masih sederhana, yang berakibat pada produktivitas menurun baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang rendah. Karena didalam kualitas dan kuantitas ada harga yang akan memberikan dampak pada petani itu sendiri. Hal ini juga di pengaruhi oleh beberapa insfrastruktur.

Dalam hal insfrastruktur, lahan dan air saat ini masih sangat memprihatinkan. Jaringan jalan produksi dan usaha tani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, sehingga belum dapat berfungsi untuk keluar-masuk alat dan mesin pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efesien. Ladang pengembalaanya semakin mengecil, karena perubahan fungsi maupun ketidak jelasan status lahannya (antara milik negara atau milik adat). Demikian pula dengan waduk-waduk dan jaringan irigasi dan air yang ada semakin menurun kapasitasnya, akibat pendangkalan dan kurangnya perawatan. Sementara pembangunan waduk dan embung besar yang baru masih jauh dari memadai untuk mendukung tuntutan peningkatan produksi komoditas pertanian, terutama didaerah

sub-optimal seperti lahan kering dan lahan rawa. Disisi lain keberadaan infrastruktur pendukung usaha penangkaran benih dan bibit juga masih sangat kurang, laboratorium sertifikasi dengan pengujian mutu, balai benih, kebun bibit maupun kebun induk juga belum tersebar merata hingga ke seluruh sentra produksi utama (http://pertanian.go.id/file/RENSTRA_2011-2015.pdf (Diakses 20 Oktober 2017)).

Padahal infrastruktur memiliki peranan penting dalam menyukseskan pembangunan pertanian. Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang optimal akan memudahkan petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari lahan pertaniannya. Petani akan lebih mudah dalam proses budidaya, akses sarana produksi, hingga pemasaran hasil pertaniannya. Jika semua hal ini terpenuhi maka tidak ada petani yang kurang sejahtera lagi dan nantinya akan mendorong pembangunan perekonomian negara secara menyeluruh (<http://farming.id/infrastruktur-sebagai-dongkrak-pembangunanpertanian>(Diakses 1 November 2017)).

Maka tidak bisa dipungkiri pembanguan insfrastruktur menjadi keharusan bagi petani, pembangunan infrastruktur pertanian harus secara berkesinambungan dan holistik. Infrastruktur pertanian tidak hanya masalah irigasi, namun juga harus menyangkut optimalisasi lahan, alat mesin pertanian, sampai dengan teknologi informatika. Lahan yang mempunyai potensi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan alat mesin pertanian yang memadai untuk meningkatkan hasil produksi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga harus bisa

dimanfaatkan untuk mengelola produk pertanian secara langsung sehingga mengurangi peran pengepul yang biasanya merugikan dalam permainan harga.

Berkaitan dengan harga, banyak dari para petani Indonesia mengandalkan para pengepul untuk biaya modal tanam dan memasarkan produk pasca panen petani, hal ini yang memberatkan bagi petani untuk menentukan harga yang sesuai dipasaran. Dalam satu rantai distribusi hasil pertanian biasanya terdapat 6-7 perantara/pengepul yang dapat menurunkan tingkat keuntungan petani. Efeknya, konsumen juga turut dirugikan karena mereka "dipaksa" untuk membeli pangan dengan harga mahal akan tetapi tidak disertai dengan kualitas pangan yang segar akibat lamanya waktu distribusi pangan. Seharusnya ada peran pemerintah untuk memotong rantai distribusi ini sehingga tidak terdapat perbedaan harga yang jauh antara harga yang diberikan petani dengan harga yang ada dipasar yang dibarengi dengan kualitas produk para petani.

Tanpa jaminan kualitas produk, petani Indonesia tidak akan mampu menembus pasar global. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini devisa negara yang diperoleh dari ekspor produk pertanian masih terbatas. Lagi-lagi penyebabnya produk-produk pertanian kita belum mampu bersaing dengan produk-produk pertanian dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia justru yang terjadi sebaliknya, pasar domestik kita mulai dikuasai oleh produk-produk pertanian luar negeri yang memiliki kualitas lebih baik dan harga yang bersaing.

Hal ini sangat di sayangkan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan sumber daya yang melimpah seharusnya bisa di optimalkan, karena secara iklim

dan geografis Indonesia sangatlah mumpuni untuk melakukan aktifitas pertanian. Terdapat hal yang tak bisa di pungkiri bahwa penduduk Indonesia masih menggantungkan penghasilannya pada sektor pertanian. Kebanyakan dari mereka adalah golongan kelas menengah kebawah atau bahkan rata-rata miskin. Kondisi ini di perparah dengan semakin sempitnya lahan pertanian yang memberikan dampak berkurangnya penghasilan petani itu sendiri.

Petani sangat lemah dalam hal permodalan, bahkan tidak memiliki akses yang mudah untuk meminjam dana sebagai modal awal produksi kepada perbankan. Hal ini dikarenakan berbagai persyaratan yang menyulitkan petani. Sebagai akibatnya petani lebih cenderung untuk memilih lembaga non bank dalam peminjaman modal awal produksi tani atau bahkan untuk menyambung hidup sehari-hari.

Sebenarnya dana awal bisa di pinjam kepada koperasi yang ada disetiap daerah, namun akan bertemu permasalahan lama yaitu koperasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan demi kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sangat disayangkan memang karena koperasi-koperasi dipedesaan banyak yang tidak berjalan, padahal koperasi program pemerintah lama yang mempunyai arti penting selain kekeluargaan juga menumbuhkan gotong royong didalam pembangunan pertanian. Padahal didalam koperasi ada kesetaraan, semua anggota koperasi memiliki hak yang setara atau boleh dibilang sebagai pemegang saham sebuah koperasi. Jika modal koperasi menggunakan dana desa, maka hak

dan kewajiban anggota koperasi akan sama, tidak peduli orang kaya maupun orang miskin.

Untuk itulah bagaimana pentingnya pengelolaan Agribisnis, Agribisnis merupakan sistem dalam pertanian yang mengaitkan dari proses hulu sampai sistem hilir dengan memanfaatkan sumber yang ada untuk tujuan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu peran agribisnis dalam sektor pertanian adalah dalam penyediaan bahan pangan. Ketersediaan berbagai jenis kualitas pangan bagi masyarakat merupakan kunci dari pembangunan di Indonesia. Mulai zaman reformasi peran agribisnis sangatlah penting karena secara langsung dapat mempengaruhi ketahanan pangan serta kondisi sosial, politik, dan keamanan nasional.

Agribisnis adalah sebuah sistem, sehingga semua kegiatan yang terdapat dalam sistem tersebut harus saling terkait dan mendukung. Agribisnis mampu meningkatkan efisiensi pada sektor pertanian sehingga modernisasi pertanian dapat tercapai. Dengan agribisnis dalam sektor pertanian juga mampu melibatkan banyak tenaga kerja untuk mengolah semua sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selain itu agribisnis merupakan alternatif untuk mengembangkan strategi pembangunan ekonomi. Pengembangan sektor agribisnis, khususnya untuk menghadapi era globalisasi bisa difokuskan dengan pengembangan lapangan usaha produk-produk olahan hasil pertanian yang berupa agroindustri yang nantinya akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Akan tetapi agribisnis di Indonesia bukan tanpa hambatan, masalah pemasaran produk hasil pertanian dan rendahnya mutu sumber daya manusia,

khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini tidak didukung pula oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari pra panen sampai ke pasca panen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Disamping itu, pembinaan petani selama ini lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarahkan kepada praktek pemasaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan petani tentang pemasaran tetap saja kurang, sehingga subsistem pemasaran menjadi yang paling lemah dan perlu dibangun dalam sistem agribisnis.

Jika sistem agribisnis ini tidak segera dibenahi maka wajar jika kita petani Indonesia kalah bersaing dipasar internasional karena dinamika perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian dihadapkan kepada persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional, telah memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka ekspor-impor seluas-luasnya. Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat karena terjadinya integrasi pasar regional/internasional terhadap pasar domestik (http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2010-2014.pdf (Diakses tanggal 29 oktober 2017)).

Walaupun negara Indonesia merupakan negara agraris, akan tetapi sebagian besar kekayaan tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat karena masih kurangnya pemahaman dan masih banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan agribisnis. Padahal agribisnis dapat menjadi bisnis yang mampu menjadikan perekonomian negara Indonesia lebih baik lagi. Agribisnis merupakan suatu strategi yang paling tepat untuk membangun ekonomi negara yang

mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait didalamnya sehingga dapat membantu memecahkan masalah perekonomian yang melanda Indonesia karena dengan strategi agribisnis dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Strategi pembangunan sistem agribisnis yang dicirikan yaitu berbasis pada pemberdayaan keanekaragaman sumber daya yang ada di setiap daerah serta dapat memberikan kontribusi terhadap keragaman kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu agribisnis juga mengandalkan sumberdaya alam dan teknologi serta sumber daya manusia yang terampil yang diyakini mampu menjadikan perekonomian di Indonesia memiliki daya saing dan menjadikan perekonomian negara menjadi lebih bersinergis dalam perekonomian dunia. Agribisnis merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk membuka lahan pekerjaan baru bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, serta agribisnis juga dapat mengurangi angka pengangguran di negara Indonesia.

Untuk itu, USAID (*United States Agency for International Development*) sebagai Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat sekaligus menjadi instrumen ekonomi sosial pemerintah Amerika Serikat melalui program AMARTA (*Agribusiness Market and Support Activity*) program ini diselenggarakan untuk mengembangkan tujuan-tujuan yang terdapat dalam kemitraan komprehensif AS-Indonesia. Kemitraan ini berupaya meningkatkan kesejahteraan, melestarikan lingkungan hidup, memperkuat demokrasi, meningkatkan taraf hidup, serta

menjamin keamanan bagi warga Amerika dan Indonesia. AMARTA menangani proses tata rantai nilai kopi, kakao, dan hortikultura bernilai tinggi di provinsi Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Bali, Jawa Barat, dan Papua. Proyek ini diselenggarakan dengan bekerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia, sektor swasta, para petani kecil dan Universitas (<http://www.tribunews.com/bisnis/2011/04/20/proyek-agribisnisusaiduntungkan-petani-indonesia> (Diakses 8 November 2018)).

Pada tahun 2007, Pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga independen yaitu USAID, memberikan bantuan bagi sektor pertanian Indonesia. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui implementasi program pembangunan pertanian. Program tersebut bernama *Agribusiness Market and Support Activity* (AMARTA). Program ini merupakan bantuan untuk membangun perekonomian Indonesia melalui sektor pertanian. AMARTA membantu Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan sistem agribisnis Indonesia yang kuat untuk berkontribusi terhadap pekerjaan, pertumbuhan, dan kemakmuran yang menguntungkan. AMARTA bekerjasama dengan perusahaan swasta, petani dan pelaku lainnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dalam rantai nilai seperti komoditas ekspor bernilai tinggi, produk hortikultura berkualitas tinggi, coklat, dan komoditas lainnya. Ini bukan GDA (*Global Development Alliance*), tapi ada banyak mitra sektor swasta yang memberikan bantuan teknis dan memiliki perjanjian pembelian dengan kelompok tani. Dari semua mitra yang terlibat, PT Freeport adalah satu-satunya penyumbang dana.

Program *Agribusiness Market and Support Activity* (AMARTA) dari lembaga USAID sejak akhir 2007 telah membantu menghasilkan pendapatan hingga sebesar 370 juta dolar AS bagi para petani di berbagai daerah di Indonesia. Proyek ini telah memberikan pelatihan dan dukungan untuk 190.546 petani di 3.798 kelompok tani. Kerja sama dengan pemerintah daerah termasuk memberikan pelatihan kepada 2.137 penyuluh. program AMARTA juga telah menghasilkan sekitar 40 perjanjian kemitraan publik-swasta ("*public private partnership*"/PPP) antara lain termasuk dengan Kementerian Pertanian, PT Freeport Indonesia, serta SCAI (*Speciality Coffee Association Indonesia*) dalam meningkatkan kualitas kopi (<http://bandung.bisnis.com/read/20110420/3/42573/amarta-bantu-petani-hasilkan-us370-juta> (Diakses 27 Oktober 2017)).

Program USAID-AMARTA juga bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Padjadjaran (LPPM-UNPAD), pemerintah daerah, dan pelaku agribisnis tersebut. Atas dasar misi yang sama yaitu untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian di Indonesia, LPPM-UNPAD dan USAID akhirnya bekerjasama untuk mendirikan *value chain center* (VCC), pendirian ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan *stakeholders* pembangunan agribisnis di Jawa Barat (petani, eksportir, supermarket, perbankan, pemerintah, asosiasi dan LSM) berupa keberadaan suatu lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan petani dengan pelaku pasar serta pemerintah dalam meningkatkan daya saing agribisnis di Jawa Barat (<http://news.unpad.ac.id/?p=39485> (Diakses 30 Januari 2018))

VCC melakukan tiga aktivitas utama, yakni : (1) melakukan *multistakeholder meeting* untuk mengatasi hambatan petani kecil dalam mengakses

teknologi, pasar, informasi dan pembiayaan; (2) melakukan berbagai pelatihan bagi para pelaku agribisnis, baik petani kecil, pelaku pasar maupun industri pendukung, juga untuk aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah; dan (3) melakukan penelitian berupa analisis dan simulasi kebijakan bagi para pengambil keputusan di tingkat pelaku usaha dan pemerintah.

Agribisnis Indonesia harus ada perubahan yang lebih baik, khususnya di Jawa Barat. Untuk mengejar model rantai pasokan baru (seperti *hypermarket*), produk, dan struktur bisnis. Namun agribisnis Indonesia juga harus menjadi lebih dinamis untuk mengimbangi transformasi agribisnis secara cepat di seluruh dunia. Yang menjadi masalah bukan hanya kemampuan produk Indonesia untuk bersaing di pasar ekspor, namun juga kemampuan agribisnis Indonesia untuk menahan diri terhadap persaingan asing di pasar domestik. AMARTA mencoba untuk berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas, karena itu kunci untuk meningkatkan rantai nilai agribisnis di Indonesia, produktivitas dan kualitas yang tinggi sangat penting dalam setiap rantai nilai, dimulai dengan produksi: tanpa makanan primer dan produk serat berkualitas tinggi di awal, tidak ada usaha dan biaya dari hilir yang akan menciptakan produk berkualitas tinggi di hulu. Untuk merangsang produktivitas di seluruh rantai nilai, tim DAI mencari "tuntutan pelanggan" – (pengecer, pemasok, dan perantara lain) yang berminat bersedia membayar premi untuk indikator harga yang berkualitas dan dikirimkan ke setiap perusahaan dan pertanian dalam rantai nilai sebagai sebuah insentif untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas (<https://www.dai.com/our-work/projects/indonesia-agribusiness-market-and-support-activity-amarta> (Diakses 28 oktober 2017))

Ada beberapa hal yang mendasari USAID-AMARTA di Indonesia. Pertama, sumber daya manusia yang berkualitas jumlahnya hanya sedikit dari sekian banyak kelompok yang berhubungan langsung dengan tata rantai nilai. Rantai nilai ini pada akhirnya tidak di pilih untuk dampak keseluruhan intervensi yang biasa. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran nilai dasar setiap intervensi dan memperbanyak waktu untuk kemungkinan pertumbuhan yang lebih besar. Kedua, bekerja sama dengan institusi nasional yang di dorong dengan implikasi memenuhi target USAID disamping sebagai maksud untuk mengembangkan institusi nasional tersebut. Pengembangan institusi sebagai target tambahan terbaik didalam hal referensi. Ketiga, perhatian untuk mempertemukan target USAID dengan petugas berat publikasi untuk proyek AMARTA dan USAID mengakibatkan banyak kritik dari proyek indonesia yang berpengaruh. Hal itu membuat proyek ini sulit dijadikan sebagai pilot emulasi yang meluas. Dan ini akan dijadikan pelajaran kedepannya: pertama, proyek yang berdampak langsung di pertanian dan di level bisnis sehingga membawa pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk mencapai pertumbuhan yang cepat. Kedua, dampak nasional dan pembangunan institusi Indonesia yang bertahan lama dalam fokus pada tujuan nasional dari bagian objek Amerika Serikat. Ketiga, perhatian terhadap keuntungan Amerika Serikat dalam pengembangan dan penerapan teknologi produksi untuk kepentingan pertumbuhan pertanian.

Secara makro, usaha peningkatan produksi pertanian dilakukan dalam bentuk program pembangunan pertanian yang bertahap sesuai dengan skala prioritas atau urgensi yang dihadapi pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Khususnya dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul pada era globalisasi dan pasar bebas (MEA) Masyarakat Ekonomi Asean.

Dalam mengkaji peranan USAID peneliti melakukan *previous studies*, karya ilmiah mengenai USAID yang menurut peneliti ada keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu skripsi Fahmi Frizana Sinaga dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia dengan judul penelitian “*Peranan USAID (United States Agency For International Development) Melalui The Environmental Services Program (ESP) Dalam Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Pasca Tsunami Di Aceh (2004-2009)*”. Dalam penelitian tersebut membahas dampak Tsunami Aceh tahun 2004 terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada penyediaan air bersih dan sanitasi; untuk mengetahui langkah-langkah apa yang ditempuh oleh USAID melalui *The Environmental Services Program (ESP)* dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh; untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi USAID melalui program ESP dalam menyediakan air bersih dan sanitasi di Aceh; dan, untuk mengetahui keberhasilan apa saja yang telah dicapai USAID melalui program ESP dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh.

Karya ilmiah lain yang menurut peneliti ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anugrah dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanudin tahun 2013. Dengan judul penelitian “*Peranan USAID (United States Agency For International Development) dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Barru*”. Penelitian ini membahas bagaimana bantuan USAID yang diberikan melalui

program KINERJA tidak memberikan efek ketergantungan bagi kabupaten Baru namun pemberian bantuan USAID dalam bidang peningkatan iklim usaha sebenarnya telah membawa kepentingan Amerika untuk memudahkan para investornya untuk berinvestasi di Indonesia mengingat fakta juga bahwa banyaknya perusahaan Amerika di Indonesia yang 90 persen bergerak di bidang pertambangan dan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya perbaikan PTSP, berbagai kesulitan yang dialami investor dapat teratasi dan berbagai proyek dapat selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat, Perbaikan PTSP ini juga akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia.

Atas dasar latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan *United State Agency For International Development (USAID) Melalui Program Agribusiness Market And Support Activity (AMARTA) Dalam Meningkatkan Sektor Pertanian Di Jawa Barat Tahun 2008-2011*”**.

Keterkaitan terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yaitu antara lain:

1. Studi Hubungan Internasional di Amerika Serikat, Mata kuliah ini membantu dalam mempelajari mengenai diplomasi dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, bagaimana Amerika Serikat dengan Hegemoninya dapat mempengaruhi Indonesia.

2. Politik Luar Negeri, Mata kuliah ini membantu menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan negara lain dalam interaksinya dengan negara lain, serta menjelaskan kebijakan politik luar negeri suatu negara yang diarahkan diluar negaranya demi mencapai kepentingan nasional.
3. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang, Mata kuliah ini membantu mengkaji bagaimana kondisi Sosial Ekonomi Politik dinegara berkembang dimana kesenjangan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan sosial masyarakatnya sehingga ini menjadi perhatian yang sangat penting dan memiliki hubungan keterkaitan dengan penelitain ini yaitu Pertanian Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pembatasan masalah penelitian ini akan ditetapkan terhitung sejak tahun 2008.

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti ingin mengutarakan rumusan masalah **“Bagaimana Peranan *United State Agency For International Development (USAID)* dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribusiness Market and Support Activity (AMARTA)* di Jawa Barat ?”**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribusiness Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat?
2. Kendala apa saja yang di hadapi *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribusiness Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat ?
3. Sejauh mana *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribusiness Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Untuk pembatasan masalah peneliti membatasi program AMARTA yang mulai dijalankan pada awal tahun 2008-2011, 2008 merupakan awal dijalankan program AMARTA I walaupun secara tertulis dimulai sejak akhir tahun 2007. Dalam melanjutkan program AMARTA I, kemudian ada program lanjutan AMARTA II pada tahun 2011-2016 untuk mencapai target yang lebih luas lagi, tapi berhenti dipertengahan tahun 2013 karena sudah berbeda prioritas bantuan dari USAID, untuk memfokuskan pada pengembangan komoditi coklat di Sulawesi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk dapat menjawab rumusan masalah mayor “Bagaimana *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribussines Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat?

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah minor diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribussines Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sector pertanian melalui program *Agribussines Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat ?
3. Untuk mengetahui sejauh mana peranan *United State Agency For International Development* (USAID) dalam meningkatkan sektor pertanian melalui program *Agribussines Market and Support Activity* (AMARTA) di Jawa Barat ?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan penambahan wawasan, pengembangan teori-teori pada Ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian bantuan luar negeri, politik luar negeri dan Studi Ilmu Hubungan Internasional di Amerika Serikat bagi para akademisi dan peneliti Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya diluar jurusan tersebut, dalam menganalisa bantuan luar negeri dari negara - negara pemberi bantuan kepada negara lain, dalam hal ini dari negara Amerika Serikat melalui USAID kepada negara penerima bantuan yaitu Indonesia.